

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, A.Z, Rachmad, Baro. 1997. *Perbandingan Asas-Asas Hukum Adat Pidana Indonesia dengan Asas-Asas Hukum Pidana Barat dan Texas*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah. 2008 *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*.
- Huala, Adolf. 1990 *Aspek – Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mahmudah, Nunung. 2006. *Illegal Fishing*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Azas – Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Paramita, Pradnya. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sjahdeini , Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Supriadi dan Aliminuddin. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surachman dan Suhandi Cahaya. 2010. *Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darwanto, Buku Saku *KAMLA KOARMATIM*, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, 2016, hlm.23

### B. Perundang – Undangan

Undang – Undang 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan – Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut.

Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *UNCLOS*.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan SDA Hayati di ZEE Indonesia

### **C. Lain – Lain**

Tridoyo Kusumastanto, “Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI”, *Law & Finance Institutional Partnership*,

Abdul Muthalib Tahar dalam *Diktat Hukum Laut Internasional menurut KHL 1982 dan Perkembangan Hukum Laut* di Indonesia pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, 2007,

<http://eprints.undip.ac.id/5892/1/lazarus.pdf>. Diakses Pada: 21 Februari 2019. Pukul 21.00

“Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia”, 6 Agustus 2009, [http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan\\_nusantara](http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_nusantara). Pukul. 17.00.

Wawancara dengan Bapak Ir. Yeppy Sudirja. M,Si., selaku Kepala Subdit Operasi Pusat Pengendalian, Direktorat Pemantauan Dan Operasi Armada, wawancara di lakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019  
Wawancara dengan Bapak Agus Suprajogi S.A. S.H,MH. selaku Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, wawancara di lakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019